

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, millenium development Goals (MDG'S) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan manusia indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) , indek pembangunan gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya mengamankan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 3 orang (8,6%)

perempuan, padahal 50,4 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak. Dengan tersedianya data gender dan anak yang terpilah menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan anak. Dengan tersedianya data yang tepat dan akurat maka akan memudahkan dalam melahirkan perencanaan yang responsif gender dan anak.

Dengan disusunnya buku perspektif gender dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak

berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, SKPD baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait (Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenag) di Kabupaten Lima Puluh Kota serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71” LU dan 0022’14,52” LS serta antara 100015’44,10” – 100050’47,80” BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu ;Kabupaten Agam , Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 KM² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luhak yaitu : 61,68 KM². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 M), Gunung Bungsu (1.253 M), Gunung Sanggul (1.495 M) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / Irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau.Dari 13 Kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 Nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 Nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Luhak

5. Kecamatan Lareh Sago Halaban
6. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguak
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 **Situasi Geografis**

Secara Geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawah lunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuah Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dangung-dangung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m . Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 Km, Batu sangkar Km, Painan 211 Km, Lubuak Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padng Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuah Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tanjung Pati 2 Km,

Dangung-dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 tercatat sebanyak 376.072 jiwa, dengan rincian 186.821 jiwa penduduk laki-laki dan 189.251 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,72 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Dengan rasio jenis kelamin adalah 98,72%, maka angka ini memperlihatkan bahwa pada umumnya didaerah Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah yang relatif lebih banyak ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan di kabupaten lima puluh kota, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntunan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1				
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin				
Tahun 2017				
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio jenis Kelamin
1	Payakumbuh	17.336	17.623	98,37
2	Akabiluru	13.463	13.805	97,52
3	Luhak	13.520	13.925	97,09
4	Lareh Sago Halaban	18.617	18.997	98,00

5	Situjuah Limo Nagari	10.697	11.161	95,84
6	Harau	25.444	25.280	100,65
7	Guguak	17.813	18.826	94,62
8	Mungka	13.352	13.698	97,47
9	Suliki	7.456	7.925	94,08
10	Bukik Barisan	11.496	11.915	96,48
11	Gunuang Omeh	6.733	6.596	100,39
12	Kapur IX	15.297	14.143	106,19
13	Pangkalan Koto Baru	15.597	14.735	104,09
	Kabupaten	186.821	189.251	98,72
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Pada daerah-daerah tertentu juga ditemukan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Daerah tersebut adalah kecamatan Harau, Kapur IX, Pangkalan dan Gunuang Omeh. Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah pada daerah-daerah perkebunan.

Tabel 3.2				
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk				
Tahun 2017				
No	Kecamatan	Luas /Area (km2)	Penduduk	Kepadatan Per km2
1	Payakumbuh	99,47	34.959	344
2	Akabiluru	94,26	27.268	284
3	Luak	61,68	27.445	437
4	Lareh Sago Halaban	394,85	37.614	93
5	Situjuah Limo Nagari	74,18	21.858	289
6	Harau	416,80	50.724	119
7	Guguak	106,20	36.639	339
8	Mungka	83,76	27.050	317
9	Suliki	136,94	15.381	110
10	Bukik Barisan	294,20	23.411	78
11	Gunuang Omeh	156,54	13.440	84
12	Kapur IX	723,36	29.702	40

13	Pangkalan Koto Baru	712,06	30.581	42
	Kabupaten	3354.30	376.072	112,12
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 mencapai 112,12 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 437 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 40 jiwa per km². Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tercatat sebesar 91.789. Maka rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2016 tercatat sebesar 4 jiwa per rumah tangga.

3.1 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 3.3				
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur				
Tahun 2017				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	19.439	18.526	37.965
2	5-9	19.432	18.527	37.959
3	10-14	17.625	16.390	34.015
4	15-19	14.730	13.040	27.770
5	20-24	11.805	11.449	23.254
6	25-29	13.441	13.461	26.902
7	30-34	14.251	14.259	28.510
8	35-39	13.597	13.961	27.558
9	40-44	12.393	12.223	24.616
10	45-49	10.771	10.855	21.626
11	50-54	9.666	10.842	20.508
12	55-59	9.291	10.744	20.035
13	60-64	8.240	8.699	16.939
14	65+	12.140	16.275	28.415
	Kabupaten	186.821	189.251	376.072
Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota				

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 5 s/d 9 tahun dengan jumlah sebanyak 40.023 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu sebesar 11.140 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) ternyata jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja.

BAB IV PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi Perempuan dan Anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun. Indikator Pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang dtamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan nberdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan ole penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah Penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai Kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan menghasilkan anak –anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada BAB ini. Data dan Informasi yang

disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.1

Jumlah APK Murid Usia 7-12 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	APK
1	Kec. Akabiluru	3195	3,673	86.99
2	Kec. Bukik Barisan	2628	2,578	101.94
3	Kec. Guguk	4335	4,670	92.83
4	Kec. Gunuang Omeh	1619	1,660	97.53
5	Kec. Harau	6461	6,252	103.34
6	Kec. Kapur IX	3463	3,919	88.36
7	Kec. Lareh Sago Halaban	4597	4,404	104.38
8	Kec. Luak	2697	3,161	85.32

9	Kec. Mungka	3439	3,431	100.23
10	Kec. Pangkalan Koto Baru	3629	4,276	84.87
11	Kec. Payakumbuh	3942	4,635	85.05
12	Kec. Situjuh Limo Nagari	2536	2,852	88.92
13	Kec. Suliki	1687	1,953	86.38

Dari tabel diatas dapat dilihat data APK untuk SD (usia 7-12 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (84,87%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (104,38%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APK usia 7-12 tahun berada pada angka 92,78%. Tapi pada Kecamatan dengan angka yang melebihi 100% ini menunjukkan adanya murid yang diterima di sekolah belum cukup umur atau melebihi umur seharusnya. Hal ini perlu menjadi perhatian daerah dalam membuat kebijakan dalam penerimaan murid baru ataupun dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APK usia 13-15 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.13
Jumlah APK Murid Usia 13-15 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk 13 - 15 Tahun	APK
1	Kec. Akabiluru	595	1,439	41.35
2	Kec. Bukik Barisan	522	998	52.30
3	Kec. Guguk	1480	1,880	78.72
4	Kec. Gunuang Omeh	493	614	80.29
5	Kec. Harau	1994	2,747	72.59
6	Kec. Kapur IX	1309	1,610	81.30
7	Kec. Lareh Sago Halaban	1615	1,815	88.98
8	Kec. Luak	927	1,469	63.10

9	Kec. Mungka	701	1,447	48.45
10	Kec. Pangkalan Koto Baru	1245	1,762	70.66
11	Kec. Payakumbuh	1620	1,910	84.82
12	Kec. Situjuah Limo Nagari	610	1,132	53.89
13	Kec. Suliki	628	737	85.21

Dari tabel diatas dapat dilihat data APK untuk SMP (usia 13-15 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (41,35%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (88,98%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APK usia 13-15 tahun berada pada angka 69,35%.

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under

estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APM usia 7-12 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.10
Jumlah APM Murid usia 7-12 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Murid 7 -12 tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	APM
1	Kec. Akabiluru	2748	3,673	74.82
2	Kec. Bukik Barisan	2278	2,578	88.36
3	Kec. Guguk	3221	4,670	68.97
4	Kec. Gunuang Omeh	1425	1,660	85.84
5	Kec. Harau	5379	6,252	86.04
6	Kec. Kapur IX	2987	3,919	76.22
7	Kec. Lareh Sago Halaban	4018	4,404	91.24
8	Kec. Luak	2324	3,161	73.52
9	Kec. Mungka	2775	3,431	80.88
10	Kec. Pangkalan Koto Baru	3085	4,276	72.15
11	Kec. Payakumbuh	3423	4,635	73.85
12	Kec. Situjuh Limo Nagari	2036	2,852	71.39
13	Kec. Suliki	1415	1,953	72.45

Dari tabel diatas dapat dilihat data APM untuk SD (usia 7-12 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari (71,39%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (91.24%). Namun jika dilihat dari angka

keseluruhan secara Kabupaten maka APM usia 7-12 tahun berada pada angka 78,13%. Artinya angka tersebut masih berada pada rentang angka nasional yakni 50-90%.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APM Usia 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel.11
Jumlah APM Murid Usia 13-15 tahun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Murid 13 - 15 tahun	Jumlah Penduduk 13 - 15 Tahun	APM
1	Kec. Akabiluru	425	1,439	29.53
2	Kec. Bukik Barisan	375	998	37.58
3	Kec. Guguak	1048	1,880	55.74
4	Kec. Gunuang Omeh	380	614	61.89
5	Kec. Harau	1493	2,747	54.35
6	Kec. Kapur IX	1072	1,610	66.58
7	Kec. Lareh Sago Halaban	1302	1,815	71.74
8	Kec. Luak	572	1,469	38.94
9	Kec. Mungka	502	1,447	34.69
10	Kec. Pangkalan Koto Baru	1006	1,762	57.09
11	Kec. Payakumbuh	1211	1,910	63.40
12	Kec. Situjuh Limo Nagari	473	1,132	41.78
13	Kec. Suliki	494	737	67.03

Dari tabel diatas dapat dilihat data APM untuk SMP (usia 13-15 tahun) yang terendah yaitu di Kecamatan Akabiluru (29, 53%) dan angka yang tertinggi adalah di Kecamatan Lareh Sago Halaban (71,74%). Namun jika dilihat dari angka keseluruhan secara Kabupaten maka APM usia 13-15 tahun berada pada angka 52,33%. Artinya angka tersebut masih berada pada rentang angka APM SMP secara nasional yakni 50-70%.

Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

V.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

V.2. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

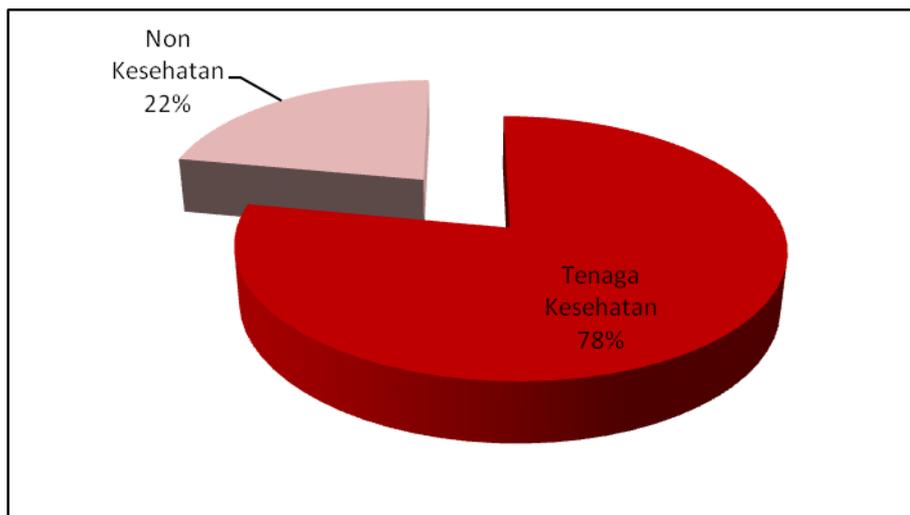
Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2018 didapatkan jumlah kematian ibu tahun 2017 sebanyak 103,23/100.000 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang berjumlah 76,63/100.000.kasus

V.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu seperti pengetahuan, sikap terhadap pemilihan penolong persalinan, untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan kepelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tidak berkualitas, dan perilaku tenaga kesehatan yang tidak ramah.

Gambar. 7
Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017



V.4 Penderita HIV dan AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunya / hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual, disamping itu juga bisa melalui darah/ produk darah (misalnya tranfusi, suntikan, tindakan medis dll) serta dari ibu yang terinfeksi kepada janin/ bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 provinsi. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.

V.5 KELUARGA BERENCANA.

Jumlah akseptor KB aktif tahun 2017 adalah 41.097 (73,4%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 42.904 akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya. Sementara Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2017 adalah dengan Suntik sebanyak 3.519 (67,7%) , kemudian Pil KB sebanyak 1.662 (74,8%).

Tabel V.5

Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin											
Tahun 2017											
No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1	Harau	172	648	585	3.200		5.556	32	197	229	5.985
2	Luak	96	294	221	1.828	502	2.941	12	130	142	3.883
3	Payakumbuh	174	250	670	2.054	617	3.965	32	149	181	4.146
4	Lareh Sago Halaban	95	164	476	3.206	501	4.442	7	139	146	4.588
5	Mungka	89	152	354	1.653	384	2.632	7	136	143	2.775
6	Suliki	102	200	117	638	200	1.257	11	63	74	1.331
7	Situjuh Limo Nagari	62	674	276	984	272	4.620	8	66	74	4.694
8	Akabiluru	77	172	238	1.754	278	2.519	13	48	61	2.580
9	Guguak	148	385	375	1.957	471	3.336	10	151	161	3.497
10	Kapur IX	37	99	565	1.523	1.040	3,264	2	105	107	3.371
11	Bukik Barisan	52	143	200	1.805	372	2.572	0	148	148	2.720
12	Gunuang Omeh	80	52	130	516	383	1.161	0	41	41	1.202
13	Pangkalan Koto Baru	104	144	466	2.224	412	3.350	3	61	64	3.414
	Kabupaten	1.288	3.377	9.475	23.342	6.383	43.865	137	1.434	1.571	45.436
	Sumber Data : DP2KBP3A Kab.Lima Puluh Kota										

V.6. USIA PERKAWINAN PERTAMA

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

Jika kita lihat jumlah perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bab III didapatkan jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Dan juga jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik. Untuk itu Perempuan tidak hanya harus berperan di ranah domestik tetapi peranan perempuan diranah publik akan diuraikan dibawah ini.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau kebijakan yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan

perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2017

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE PEREMPUAN
1	Kab. Lima Puluh Kota	32	3	35	8,6 %
Jlh		32	3	35	8,6 %

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 adalah sebesar 3 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2017 adalah 8,6%, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga Eksekutif. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Tabel 6.2
Jumlah dan Persentase ASN Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2017

No	Jenis jabatan	JUMLAH	Persentase
1	Golongan I	41	0,64 %
2	Golongan II	943	14,61 %
3	Golongan III	3.229	50,03 %
4	Golongan IV	2.241	34,72 %
	JUMLAH	6.454	100 %

Sumber data: BPS Kab.LPK

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dengan jumlah pegawai pada tahun 2017 adalah sebanyak 6.454 orang, yang terdiri dari orang laki-laki 2.583 dan 4.912 orang perempuan. Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 55 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 1.264 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.396 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 2.780 orang.

Dari tabel 6.2 dapat dilihat gambaran keterlibatan perempuan pada bidang Eksekutif dimana pada golongan ruang I sebanyak 0,73%, golongan ruang II sebanyak 16,86%, golongan ruangan III sebanyak 45,31%, golongan ruang IV sebanyak 37,09 %, dapat dilihat semakin tinggi golongan ruangnya semakin tinggi persentase perempuannya.

Tabel 6.3
Jumlah dan Persentase ASN Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jlh
I	Sekretariat Daerah			55
1	Bagian tata Pe- merintahan Umum	8	4	12
2	Bagian hukum	2	4	6
3	Bagian Organisasi	4	8	12
4	Bagian Kerja Sama	5	3	8
5	Bagian adm pembangunan	10	3	13
6	Bagian perekonomian	3	3	6
7	Bagian kesejahteraan Rakyat	7	3	10
8	Bagian umum dan perlengkapan	25	9	34
9	Bagian keuangan	8	6	14
10	Bag Hub Masyarakat dan pemberitaan	4	3	7
II	Sekretariat DPRD	23	8	31

III	Sekretariat KPU	6	3	9
IV	PDAM	3	0	3
V	INSPEKTORAT	24	16	40
VI	Satpol PP	37	11	48
VII	BADAN	124	87	211
	BAPPEDA	20	18	38
	BKPSDM	25	18	43
	Badan Keuangan	41	33	74
	BP Bencana Daerah	24	5	29
	Badan Kesbang Politik	14	3	27
VIII	DINAS	1.581	3.379	4.960
	Dinas pendidikan dan kebudayaan guru TK/-SD/SMP jaga dan TUSD /SMP	142	109	251
	DISPARPORA	831	2.815	3.646
	Dinas kesehatan	107	56	163
	Dinas PU dan penataan ruangan	23	19	42
	DISTANHORTBUN	61	81	142
	Dinas peternakan dan keswan	41	34	75

	Dinas perikanan	14	18	32
	Dinas pangan	10	7	17
	Dinas perhubungan	37	3	40
	Dinas perdagangan,koperasi, UKM	18	17	35
	Dinas sosial	20	19	39
	DIDUKPIL	12	21	33
	Dinas perpustakaan dan kerasipan	14	12	26
	Dinas lingkungan hidup perumahan rakyat dan pemukiman	23	10	33
	DPMDN	17	11	28
	Dinas pemadam kebakaran	34	3	37
	Dinas PM dan PTSP	19	20	39
	Dinas komunikasi dan informatika	15	10	25
	Dinas perindustrian dan tenaga kerja	16	13	29
	Dinas PPKBPP dan perlindungan anak	10	22	22
X	puskesmas	60	586	646

IX	RSUD dr.Acmad Darwis	37	117	154
XI	Kecamatan	148	82	230
	Payakumbuh	11	8	19
	Suliki	6	10	16
	Guguak	6	12	18
	Bukik Barisan	13	1	14
	Lareh Sago Halaban	16	5	21
	Situjuah Limo Nagari	12	6	18
	Akabiluru	11	8	19
	Gunuang Omeh	10	2	12
	Luak	14	3	17
	Harau	12	11	23
	Mungka	6	6	12
	Pangkalan Koto Baru	13	6	19
	Kapur IX	18	4	22
	JUMLAH	2.119	4.335	6.454

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Dari Tabel 6.3 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.335 ASN Perempuan (67,17%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 2.119 orang (32,83%) . Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di

sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sasarannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program. Namun jika dilihat minimal keterlibatan perempuan pada sektor publik adalah 30% belum tercapai .

6.3 Partisipasi perempuan di bidang yudikatif

Tabel 6.4
Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2017

No	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kementerian Agama	3	74	279	64	420
2	Kantor Pertanahan	0	4	15	2	21
3	Pengadilan Negeri	0	5	19	2	26
4	Kejaksaan Negeri	0	6	36	1	43
5	Badan Pusat Statistkik	0	5	17	2	24
6	Pengadilan Agama	0	2	13	4	19
	JUMLAH	3	96	379	75	553

Sumber Data : BPS Kab.LPK

6.4 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk

mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan di segala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW dikelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.5
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	NAMA ORGANISASI PEREMPUAN
1	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW)
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh
5	Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama
6	DWP Unit Kesehatan
7	DWP Politani
8	DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota
9	DWP Unit Dinas Pendidikan
10	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11	Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah
12	Persit Bataliyon
13	Persit Kodim
14	Persit Denzipur
15	Bhayangkari Cabang 50 Kota
16	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
17	Aisyah
18	Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati)
19	Ikatan Guru TK Indonesia
20	Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ika Boga)
21	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota
22	Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota
23	Pimpinan Wilayah Nasyiatul Asyiah

24	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
25	Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA)
26	Puti Bonsu
27	Ikatan Dokter Indonesia
28	Komisi Lanjut Usia
29	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
30	Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
31	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
32	Forum Kabupaten Sehat
33	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lima Puluh Kota
34	Muslimat NU
35	Persaudaraan Muslima (SALIMAH)
36	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
37	Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)
38	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
39	Persatuan Analisis Gizi (Persagi)
40	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Sumber Data : DP2KBP3A Kab.LPK

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara-neagara di dunia, berbagai penelitian tentang permasalahan yang dihadapi negara berkembang telah dilakukan termasuk diantaranya oleh Todaro (1987) dan Nafziger (1990). Penelitian itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama d negara berkembang adalah adanya ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oelh pengurangan pengangguran, karena hal ini sangat tergantung pada bagaimana memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena secara teori pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 500 ribu pekerja.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut MDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah anantara tenga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. Indikator ini juga memungkinkan diketahuinya permasalahan yang akan muncul apabila ketenagakerjaan bermasalah. Misalnya banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dapat menimbulkan pengangguran yang pada gilirannya akan berdampak baik secara ekonomi maupun sosial. Dibandingkan dengan laki-laki perempuan relatif sulit untuk

mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Oleh karena itu kebanyakan perempuan bekerja disektor informal.

Jika kita lihat Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tercatat sebanyak 372.568 jiwa, dengan rincian 184.995 jiwa penduduk laki-laki dan 187.573 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99 persen.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2017 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 194.002 jiwa dengan rincian 188.957 jiwa bekerja dan sebesar 5.045 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2016 sebesar 187.746 jiwa dengan rincian sebanyak 22.960 jiwa sedang bersekolah, 34.591 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.766 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1

Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	104.516	83.230	187.746
	a. Bekerja	99.925	80.723	180.648
	b. Pengangguran	4.591	2.507	7.098
II	Bukan Angkatan Kerja	22.562	49.755	72.317
	a. Sekolah/Attending School	12.078	10.942	23.020
	b. Mengurus RT/House Keeping	3.063	31.528	34.591

	c. Lainnya/others	7.481	7.285	14.766

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 31.528. kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2

Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2017				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	109.639	84.363	194.002
	c. Bekerja	99.925	80.723	180.648
	d. Pengangguran	3.927	1.118	5.045
	Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop	58,69	44.58	51,59
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active	83,86	61,86	72,63
	Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate	3,58	1,33	2,60

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2008 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 99,925 laki-laki dan 80,723 perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, namun didata tahun 2016 jumlah pengangguran laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2017

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	0 – 4	19.439	18.526	37.965
2	5 – 9	19.432	18.527	37.959
3	10-14	17.625	16.390	34.015

4	15-19	14.730	13.040	27.770
5	20-24	11.805	11.440	23.254
6	25-29	13.441	13.461	26.902
7	30-34	14.251	14.259	28.510
8	35-39	13.597	13.961	27.558
9	40-44	12.393	12.223	24.616
10	45-49	10.771	10.855	21.626
11	50-54	9.666	10.842	20.508
12	55-59	9.291	10.744	20.035
13	60-64	8.240	8.699	16.939
14	65+	12.140	16.275	28.415
Jumlah	2017	186 821	189 251	376 072

Sumber Data : BPS Kab.LPK

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (83.315 orang) dan pertambangan / penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan dll (23.650 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (16.457 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel 7.4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya				
NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian	48.213	35.102	83.315
2	Pertambangan dan Penggalian, listrik, gas dan air, bangunan angkutan dll	22.412	1.238	23.650
3	Industri/ Manufacture	12.172	16.457	28.629
4	Perdagangan, Rumah makan, hotel, restourant dll	14.146	15.747	29.893

8	Lembaga keuangan real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	559	200	759
5	Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan	8.769	14.701	23.470
Total		105.712	83.245	188.957

**BAB VIII
HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri

TABEL VIII.1
TAMBAHAN NARAPIDANA PADA RUTAN SULIKI MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KEJAHATAN / PELANGGARAN
TAHUN 2017

No	Kejahatan / Pelanggaran	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencurian	8	-	8
2	Penculikan	-	-	-
3	Penganiayaan	5	-	5
4	Perjudian	2	-	2
5	Terhadap Ketertiban	1	-	1
6	Lain-lain	30	-	30
	JUMLAH	46	-	46

Sumber Data : BPS Kab.LPK

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 46 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Laki-laki

B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang

usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

**TABEL VIII.2
JUMLAH LANSIA DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA YANG POTENSIAL DAN TIDAK POTENSIAL
TAHUN 2017**

No	Kabupaten	Jumlah
	Kabupaten Lima Puluh Kota	23.420 orang

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat

**TABEL VIII.3
JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KELOMPOK
UMUR DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2017**

No	Kelompok Umur	Penduduk Penyandang Cacat		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	15 - 19	101	107	208
2	20 - 24	97	60	157
3	25 - 29	81	72	153
4	30 - 34	80	77	157
5	35 - 39	108	100	208
6	40 - 44	121	103	224
7	45 - 49	87	70	157
8	50 - 54	67	81	148
9	55 - 59	88	88	176
10	60 - 64	100	89	189
11	65 +	120	151	271
	JUMLAH	1.050	998	2.048

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.LPK

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 sebanyak 2.048 orang, artinya penyandang cacat dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18-59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama . Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali

**TABEL VIII.4
JUMLAH PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
1	Guguak	1.432
2	Harau	2.888
3	Payakumbuh	2.056
4	Bukik Barisan	2.116
5	Suliki	929
6	Pangkalan Koto Baru	1.627
7	Gunuang Omeh	1.149
8	Luak	1.684
9	Situjuh Limo Nagari	1.355
10	Mungka	1.213
11	Akabiluru	1.776
12	Lareh Sago Halaban	2.626
13	Kapur IX	1.600
	JUMLAH	22.451

Dari tabel diatas terlihat bahwa Perempuan rawan sosial ekonomi atau Rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat beras miskin (RASKIN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 sejumlah 22.451 RTS dan RTSM yang terbanyak adalah Kecamatan Harau sebanyak 2.888 RTS dan yang paling rendah adalah Kecamatan Suliki sebanyak 929 RTSM

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang / penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan / dianggap / ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki, namun demikian bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data susenas Maret 2016 pada tabel VIII.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26%), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

**TABEL VIII.5
PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			KETERANGAN
		Usia dibawah 45 th	Usia 45-59 th	Usia 60 th keatas	
1	Harau	133	259	608	
2	Situjuh	52	133	259	
3	Akabiluru	71	123	249	
4	Mungka	17	50	72	
5	Payakumbuh	135	182	437	
6	Lareh Sago Halaban	111	183	656	
7	Bukik Barisan	52	157	470	
8	Suliki	22	57	92	
9	Guguak	76	64	107	
10	Gunuang Omeh				
11	Luak	10	16	11	
12	Pangkalan				
13	Kapur IX				
	JUMLAH	679	1.224	2.961	

**BAB IX
PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk Perempuan lebih banyak di bandingkan laki-laki, yaitu 189.251 (50,32%) perempuan sedangkan laki-laki 186.821 (49,68%)
2. Daerah atau Kecamatan yang lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan adalah Kecamatan Harau, Kapur IX , Pangkalan dan Maek
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 13-15 tahun berada pada angka 69,35 %
4. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten usia 7-12 tahun berada pada angka 78,13 %.
5. Jumlah kematian ibu tahun 2017 sebanyak 103,23/100.000 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang berjumlah 76,63/100.000.kasus
6. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 33 orang, meninggal 4 orang jadi tinggal 29 orang.
7. Jumlah akseptor KB aktif tahun 2017 adalah 41.097 (73,4%) jauh naik dibandingkan dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 42.904 akseptor dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya
8. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 adalah sebesar 3 Orang.
9. Keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu 4.335 ASN Perempuan (67,17%) sedangkan ASN Laki – laki berjumlah 2.119 orang (32,83%)
10. Terdapat 46 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Laki-laki
11. Jumlah Lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 23.420 orang

12. Angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 sebanyak 2.048 orang .Penyandang disabilitas laki-laki sebanyak 1.050 orang dan disabilitas perempuan sebanyak 998 orang
13. Perempuan rawan sosial ekonomi atau Rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat beras miskin (RASKIN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 sejumlah 22.451 RTS dan RTSM yang terbanyak adalah Kecamatan Harau sebanyak 2.888 RTS dan yang paling rendah adalah Kecamatan Suliki sebanyak 929 RTSM.

B.SARAN

1. Para pengambil kebijakan di Kabupaten Lima Puluh Kota di harapkan untuk mempertimbangkan isu gender dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi masyarakat
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk meningkatkan frekwensi upaya promosi kesehatan serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih optimal